



SENIN, 28 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Akal Bulus Kejar Proyek

Tak Setor Fee, Proyek Melayang

"Kalau proyek gedung biasanya fee yang diminta sekitar 10 persen. Namun untuk proyek jalan atau irigasi, fee-nya bisa mencapai hingga 20 persen".

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, merasa heran masih adanya kepala daerah (Kada) terjerat kasus suap fee proyek. Padahal, semua proyek sudah melalui Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). "Seharusnya kepala daerah sudah tidak ikut terlibat lagi, karena sudah melalui LPSE atau ULP (Unit Layanan Pengadaan)," kata Basaria.

► Baca Akal ... Hal 14

Basaria mengungkapkan ini masih terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati Bengkulu Selatan (BS) H Dirwan Mahmud SH, bersama istri mudanya, Heni, ponakannya Wati dan seorang kontraktor Jauhar, Selasa (15/5) lalu. Keterangan KPK, Dirwan mendapatkan fee 15 persen dari setiap proyek. Kontraktor pun berlomba-lomba mendapatkan proyek yang ada di pemerintahan. Akal bulus kejar proyek-pun telah lazim dilakukan para kontraktor.

Bagaimana modus-modusnya? Berdasarkan penrusan wartawan Bengkulu Ekspres, beberapa kontraktor di BS membenarkan, untuk mendapatkan proyek harus memberikan Fee. Jika tanpa fee, sudah pasti proyek melayang. "Kalau tidak ada Fee, jangan harap bisa dapat proyek," kata seorang kontraktor yang mewanti-wanti untuk minta tidak disebutkan namanya.

Masih menurut sang kontraktor tersebut, untuk mendapatkan paket proyek yang nilainya dibawah Rp 200 juta atau proyek penunjukan langsung (PL), ada sebagian kontraktor terlebih dahulu menghubungi orang nomor 1 di bumi sekundang

setungguan ini.

Kemudian berdasarkan wasiat atau memo atau juga arahan dari orang nomor 1 tersebut, sang kontraktor mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta paket proyek. "Kalau sudah ada petunjuk dari Bupati, OPD yang bersangkutan tidak dapat menolaknya lagi, sehingga yang bersangkutan diberikan paket proyek PL," ujarnya.

Kontraktor lainnya yang juga minta namanya tidak disebutkan menuturkan, untuk mendapatkan paket proyek, dirinya tidak selalu lewat Bupati, namun bisa lewat orang-orang dekat atau keluarga Bupati.

Bahkan bisa juga lewat kepala OPD langsung, ada juga beberapa kontraktor yang ditunjuk untuk mengatur siapa-siapa kontraktor yang dipercayakan untuk mengerjakan proyek tertentu.

Sehingga saat akan mengajukan lelang atau persyaratan untuk mendapatkan paket proyek PL, kontraktor tersebut menyebutkan bekerja sama dengan kontraktor yang dipercaya Bupati. "Tidak semua paket proyek lewat Bupati, namun ada juga lewat orang dekatnya atau melalui kepala

OPD langsung dengan syarat siap membayar Fee yang disepakati," imbuhnya.

Adapun besaran Fee proyek, kata Kontraktor lainnya, tidak semuanya sama. Untuk proyek bangunan gedung besarnya sekitar 10 persen dan paling tinggi 15 persen.

Sedangkan untuk proyek jalan, jembatan dan irigasi besarnya 15 persen hingga 20 persen. Perbedaan besaran Fee ini, lantaran untuk proyek gedung kualitasnya harus bagus. Sehingga materialnya juga harus sesuai kebutuhan dan kualitasnya juga terjamin. Sedangkan untuk proyek jalan, ataupun irigasi, materialnya bisa dikurangi, sehingga tidak begitu tampak.

"Kalau proyek gedung biasanya fee yang diminta sekitar 10 persen, namun untuk proyek jalan atau irigasi, fee nya bisa mencapai hingga 20 persen," ungkapnya.

Bantah ada Kongkalikong

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Selatan (BS), Ir Silustero saat dikonfirmasi terkait praktek untuk mendapatkan paket proyek sesuai arahan dan komitmen Fee membantah

dengan tegas. Dirinya mengaku, dirinya bekerja profesional. Sehingga kontraktor yang mendapatkan paket proyek merupakan kontraktor yang layak dan memenuhi syarat. "Tidak ada arahan untuk menentukan kontraktor pelaksana kegiatan, kami bekerja profesional," ujar Silus.

Silus menambahkan, untuk paket proyek dengan nilai Rp 200 juta ke atas, proses penentuan pemenang itu melalui sistem tender. Sehingga menjadi kewenangan panitia di Unit layanan Publik (ULP). Pihaknya hanya menyerahkan dokumen paket proyek yang dilelang. Sedangkan proses lelang hingga penentuan pemenang ditangani langsung oleh ULP. "Kalau lelang itu, sudah rananya ULP" imbuhnya.

Silus menjelaskan, pihaknya hanya menangani paket proyek PL. Untuk menentukan pemenang, sambung Silus, kontraktor dapat mengajukan penawaran dengan disertai persyaratan lengkap, seperti perizinan, pengalaman kerja dan syarat lainnya.

Sehingga dokumen tersebut diperiksa satu persatu. Setelah diseleksi, pihaknya menentukan kontraktor yang paling layak